

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. TPT menunjukkan tidak berpengaruh signifikan IPM di Bojonegoro selama kurun waktu 2013 hingga 2024. Namun, berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,3490 yang melebihi ambang batas signifikansi 0,05, maka secara statistik hasil uji tersebut tidak signifikan. Artinya, peningkatan atau penurunan dalam TPT tidak memberikan dampak yang nyata terhadap IPM di Bojonegoro. Maka dapat disimpulkan bahwa bukti yang ada belum cukup untuk menolak hipotesis nol (H_0), sedangkan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara TPT terhadap IPM.
2. Variabel tingkat kemiskinan menunjukkan keterkaitan signifikan dengan IPM pada periode 2013–2024. Hasil tersebut dibuktikan melalui pengujian statistik dengan signifikansi sebesar 0,0172, yang berada di bawah taraf signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika tingkat kemiskinan meningkat, capaian IPM cenderung menurun secara signifikan. Dengan demikian, ditemukan bukti yang memadai untuk menolak H_0 dan mendukung H_a , yang menyebutkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan IPM di Bojonegoro.
3. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap IPM secara statistik selama periode pengamatan 2013–2024. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi sebesar 0,8855, yang jauh di atas

batas signifikansi 0,05. Dengan kata lain, meskipun secara teori pertumbuhan ekonomi seharusnya mendorong peningkatan IPM, dalam konteks hubungan ini belum cukup kuat untuk memberikan pengaruh yang signifikan secara empiris. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) tidak dapat ditolak mengenai spekulasi pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM.

5.2 Saran

1. Pemerintah kabupaten Bojonegoro sebaiknya mulai mengembangkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang diperoleh melalui bidang-bidang selain sektor pertambangan. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertambangan dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Dengan memperkuat sektor-sektor alternatif seperti pertanian, industri kecil-menengah, dan pariwisata, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan merata dari tahun ke tahun.
2. Pemerintah daerah Bojonegoro perlu memberikan perhatian serius terhadap pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil/pelosok yang selama ini belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Upaya ini mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan, penyediaan tenaga pengajar berkualitas, serta pemberian bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Dengan demikian, kualitas pendidikan di kabupaten Bojonegoro dapat ditingkatkan secara merata, yang kemudian akan membawa dampak positif terhadap peningkatan IPM.

3. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah daerah perlu memperluas dan mengintensifkan program penyerapan tenaga kerja, terutama dari kalangan penduduk lokal. Fokus utama dapat diarahkan pada sektor-sektor dominan seperti pertambangan dan penggalian, yang sejauh ini berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi di di Bojonegoro. Keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor-sektor ini bukan hanya mampu menekan tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan penduduk setempat.
4. Dalam mengelola pendapatan domestik regional bruto (PDRB), Pemerintah Bojonegoro seharusnya tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik semata, tetapi juga memberi perhatian lebih terhadap pembangunan kualitas SDM. Hal ini penting mengingat capaian IPM di Bojonegoro masih berada pada kategori sedang. Dengan adanya kebijakan pembangunan yang seimbang antara infrastruktur dan penguatan kapasitas SDM, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara menyeluruh.
5. Selain itu, sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan IPM, pemerintah daerah disarankan melakukan kolaborasi aktif dengan sektor swasta, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan dalam rangka menyediakan pelatihan kerja yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pelatihan berbasis kompetensi ini diharapkan mampu menjembatani adanya gap antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing serta kesempatan kerja masyarakat Bojonegoro secara signifikan.